ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014

Tika Wulan Yuli

Alumnus Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha

Drs. Muda Setia Hamid, MM, Akt

Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan Untuk mengukur kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2010-2014. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif melalui Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2014. Berdasarkan hasil penelitian ini Kinerja pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis varians, secara umum dapat dikatakan baik karena terlampauinya target anggaran, dari analisis pertumbuhan pendapatan cukup baik, dari analisis rasio keuangan juga menunjukkan pendapatan juga baik, dari Kemandirian keuangan Kota Yogyakarta masih rendah Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tidak efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan, dan derajat kontribusi BUMD terhadap PAD masih sangat kecil yaitu sebesar 4,05%. Kinerja belanja pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik, dilihat dari Pertumbuhan belanja Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dikatakan baik karena telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2010-2014 berada dibawah 100%, dengan rata-rata 91,69%. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dari analisis pembiayaan secara umum sudah terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Yogyakarta sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran.

Keyword : Analisis Kinerja Pendapatan, Analisis kinerja Belanja, Analisis Pembiayaan

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan bergaya sentralistis dianggap kurang menyentuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat hanya menguntungkan pemerintah pusat, sedangkan daerah sebagai penghasil sumberdaya menerima dana dari pusat kurang signifikan. Sentralistis melahirkan korupsi di pemerintah pusat sedangkan

pembangunan di daerah tidak merata. Masyarakat menghendaki sistem pemerintahan yang dapat merubah paradigma lama menuju paradigma baru yang mengarah pada upaya pemberdayaan kepada daerah. Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan yang mendasar yang dimaksud adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah (Mardiasmo dalam Ananda 2012:2).

Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Halim 2010:135). Oleh sebab itu, APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah serta tugas pokok dan fungsi unit kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada pencapaian tingkat kinerja tertentu,

Setelah diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah juga mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan. Peraturan pemerintah yang berpayung hukum dengan undang-undang yang telah diamandemen tentu harus menyesuaikan dan atau mengalami perubahan atau revisi. Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintahan di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah. Teknik yang banyak digunakan untuk menganalisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Analisis Kinerja Pendapatan, Analisis Kinerja Belanja, Analisis Pembiayaan.Analisis Kinerja Pendapatan

meliputi Analisis Varians Anggaran Pendapatan, Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan,Analisis Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuanganterdiri dari Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah, dan Derajat Kontribusi BUMD.

Analisis Kinerja Belanja terdiri dari Analisis Varians Belanja, Analisis Pertumbuhan Belanja, Analisis Keserasian Belanja, Analisis Efisiensi Belanja.Dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan terjadi. Analisis kinerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil andil terbanyak dalam upaya perkembangan suatu daerah. Berdasarkan ringkasan tersebut Penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa realisasi APBD di Kota Yogyakarta selama 5 tahun

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membuat perumusan masalah yaitu sebagai berikut :
Bagaimana kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta berdasarkan selama periode 2010-2014?

Tujuan penelitian ini adalah :
Untuk mengukur kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta selama periode 2010-2014.

RERANGKA TEORITIS

Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005,Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005, “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,

pengawasan daerah".

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong dalam Halim (2002:16) Menurutnya, APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (*financieel workplan*) yang dibuat untuk jangka waktu tertentu, dalam waktu mana badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (Kepala Daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga Daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, skema alur proses dan jadwal penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

Gambar 1 Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD

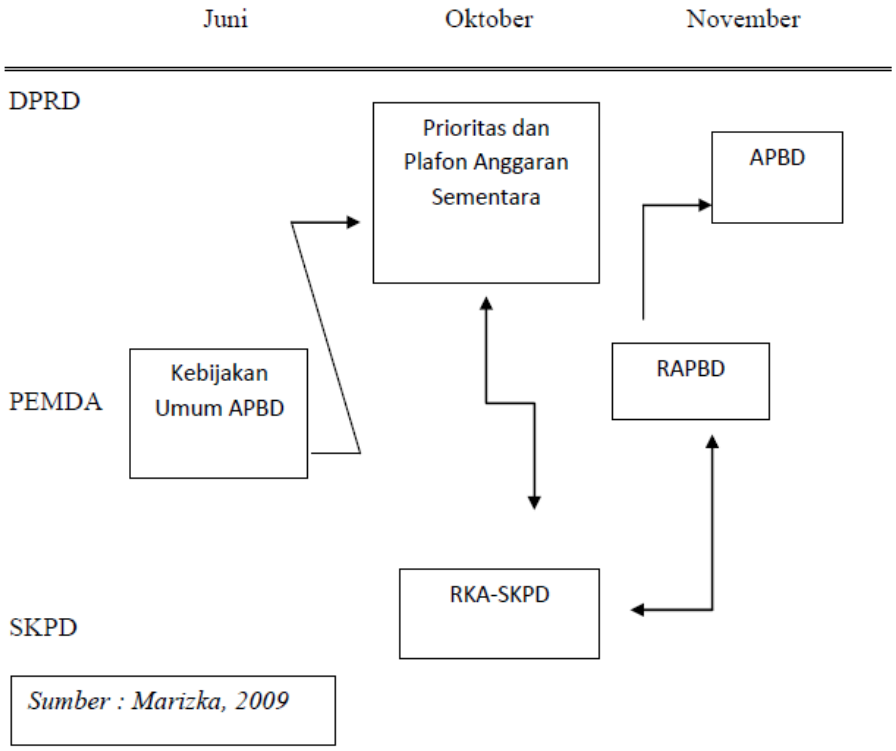

Dari gambar diatas dapat dilihat proses penyusunan APBD di mulai dengan Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Pemerintah Daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni

tahun berjalan. Selanjutnya DPRD membahas Kebijakan Umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD.Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan lagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

Gambar 2 Proses Penyusunan APBD

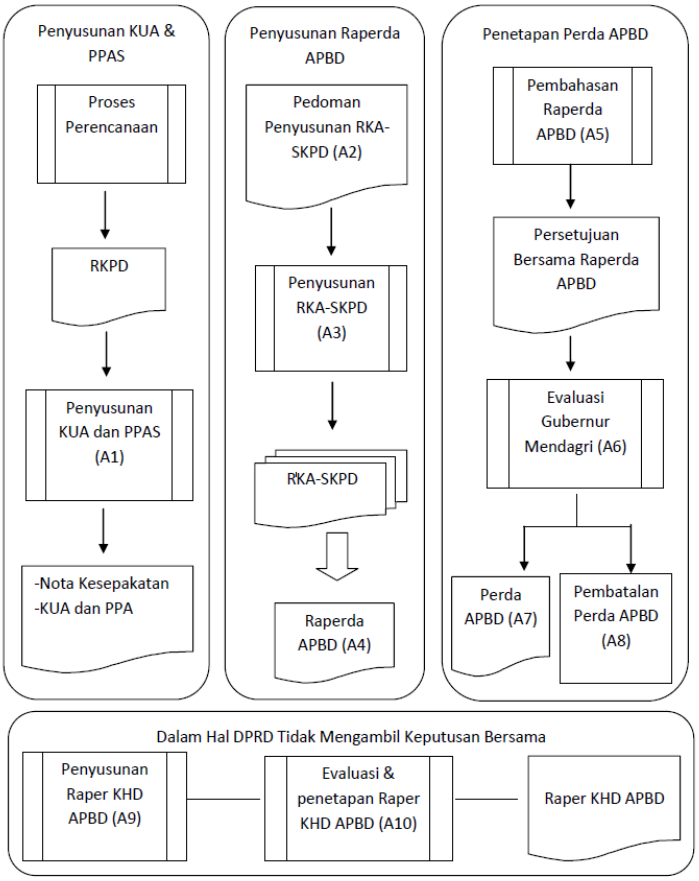

Sumber :www.noviantinurlaila.blogspot.com

Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan

Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Analisis kinerja anggaran dapat di lakukan dalam empat bagian yaitu (Mahmudi, 2007 dalam Marizka, 2009):

1) Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan anggarannya. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

a. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Biasanya selisih anggaran sudah diinformasikan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh pemerintah daerah.

b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Analisis pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif ataukah negatif.

c. Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio ini menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya.

3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Rasio efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rasio efektivitas pajak daerah dianggap baik apabila rasio ini mencapai angka minimal 1 atau 100%.

4) Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah.

2) Analisis Kinerja Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif *(value for money*). Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran

Berdasarkan informasi pada Laporan Realisasi Anggaran, kita dapat melakukan analisis anggaran belanja dengan cara :

a. Analisis Varians Belanja

Analisis Varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran.Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun positif atau negative

c. Analisis Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja secara optimal.

Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

1) Analisis Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Terhadap Total Belanja
2) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja
3) Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja
4) Analisis Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

d. Analisis Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

3) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan di lakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah.

Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 3 Kerangka Konseptual Penelitian

METODE PENELITIAN

Penentuan Sampel

Jenis Dan Sumber Data

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka obyek penelitian difokuskan pada pemerintah daerah Kota Yogyakarta (beralamat di Jalan Kenari No.56 Yogyakarta 55165) Data yang dikumpulkan dan digunakan untuk mendukung penulisan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi serta sumber-sumber lainnya berupa data runtut waktu yaitu APBD dan Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi yaitu dengan cara melakukan analisis terhadap semua catatan dan dokumen yang dimiliki oleh organisasi yang terpilih sebagai obyek penelitian. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan data keuangan dan non keuangan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta. Dokumen yang diperlukan yaitu: Laporan Realisasi Anggaran APBD Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2014.

Definisi Operasional Dan Pengukuran

Alat Analisis Data

1. **Analisis Kinerja Pendapatan**

dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus :

a. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun t} = \frac{PAD\ Tahun\ t - PAD\ Tahun\ t-1}{PAD\ Tahun\ t-1}\ x\ 100\%$$

c. Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Derajat Desentralisasi

$$\frac{Pendapatan\ \ Asli\ Daera\ h}{Total\ \ Pendapatan\ \ Daera\ h}\ x100\%$$

2) Rasio Kemandirian Keuangan

$$\frac{Pendapatan\ \ Asli\ Daera\ h}{Bantuan\ \ pemerinta\ \ h\ pusat\ + pinjaman}\ x\ 100\%$$

3) Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah

Rumus Rasio efektivitas

$$\frac{Realisasi\ \ Pajak\ \ Daera\ h}{Target\ \ pajak\ \ daera\ h}\ x100\%$$

rumus rasio efisiensi

$$\frac{Biaya\ \ pemungutan\ \ \ pajak\ \ daera\ h}{Realisasi\ \ pajak\ \ daera\ h}\ x\ 100\%$$

4) Derajat Kontribusi BUMD

$$\frac{Penerimaan\ \ \ bagian\ \ laba\ \ BUMD}{Penerimaan\ \ \ PAD}\ x100\%$$

2. Analisis Kinerja Belanja

a. Analisis Varians (Selisih Belanja)

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

$$\frac{Belanja\ \ Tahun\ t - Belanja\ \ Tahun\ t-1}{Belanja\ \ Tahun\ t-1} x\ 100\%$$

c. Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja operasi terhadap Total Belanja

$$\frac{Total\ \ Belanja\ \ Operasi}{Total\ \ Belanja} x\ 100\%$$

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\frac{Total\ \ Belanja\ \ Modal}{Total\ \ Belanja} x\ 100\%$$

2) Analisis Belanja Langsung dan tidak Langsung terhadap Total Belanja

Rasio Belanja Langsung dengan total belanja

$$\frac{Total\ \ Belanja\ \ langsung}{Total\ \ Belanja} x\ 100\%$$

Rasio Belanja Tidak Langsung dengan total belanja

$$\frac{Total\ \ Belanja\ \ Tidak\ \ Langsung}{Total\ \ Belanja} x\ 100\%$$

d. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{Realisasi\ \ Belanja}{Anggaran\ \ Belanja} x\ 100\%$$

ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kinerja Pendapatan

dapat dilakukan dalam bentuk rasio dengan menggunakan rumus :

a. Analisis Varians (Selisih) Pendapatan

Tabel 1
Laporan Perhitungan Pendapatan
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2010	818.052.316.985	815.495.924.651,51	99,69 %
2011	917.982.098.731	951.681.432.622,59	103,67 %
2012	1.088.827.758.053	1.157.578.918.317,01	106,31 %
2013	1.283.706.256.200	1.309.580.194.014,42	102,02 %
2014	1.210.102.185.890	1.459.742.435.083,81	120,63 %
Rata-Rata			106,46 %

Sumber :Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari tabel di atas berdasarkan analisis varians dapat dilihat bahwa kinerja pendapatan Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik karena tercapainya target yang dianggarkan ditunjukkan dari tahun 2011-2014 yaitu sebesar 103,67%, 106,31 %, 102,02% dan 120,63%.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Tabel 2
Pertumbuhan Pendapatan
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	PAD	Persentase	Total Pendapatan	Persentase
2010	179.423.640.057,51	11,12%	815.495.924.651,51	8,73%
2011	228.870.559.645,59	27,56%	951.681.432.622,59	16,70%
2012	338.283.728.285,01	47,81%	1.157.578.918.317,01	21,64%
2013	383.052.140.420,42	13,23%	1.309.580.194.014,42	13,13%
2014	470.641.528.444,03	22,87%	1.459.742.435.083,81	11,47%
Rata-rata		24,52%		14,33%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari tabel perhitungan di atas, kinerja anggaran dari analisis pertumbuhan pendapatan dan PAD Kota Yogyakarta cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang positif yaitu 24,52%. Kecenderungan pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebesar 34,58%.

c. Analisis Rasio Keuangan

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 3
Derajat Desentralisasi
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	**PAD**	**Pendapatan Daerah**	**Rasio Derajat Desentralisasi**	**Kriteria Rasio**
2010	179.423.640.057,51	815.495.924.651,51	22%	Baik
2011	228.870.559.645,59	951.681.432.622,59	24,05%	Baik
2012	338.283.728.285,01	1.157.578.918.317,01	29,22%	Baik
2013	383.052.140.420,42	1.309.580.194.014,42	29,25%	Baik
2014	470.641.528.444,03	1.459.742.435.083,81	32,24%	Baik
Rata-rata			27,35%	Baik

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa derajat desentralisasi Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik. Rata-rata tingkat derajat desentralisasi pada tahun 2010-2014 yaitu 27,35%.

2) Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 4
Kemandirian Keuangan
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah pusat/provinsi	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
2010	179.423.640.057,51	614.973.004.594	29,18%	Konsultatif
2011	228.870.559.645,59	686.260.682.977	33,35%	Konsultatif
2012	338.283.728.285,01	808.714.790.032	41,83%	Konsultatif
2013	383.052.140.420,42	914.763.053.594	41,87%	Konsultatif
2014	470.641.528.444,03	989.100.906.639,78	47,58%	Konsultatif
Rata-rata			38,76%	Konsultatif

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa kemandirian keuangan Kota Yogyakarta masih rendah dan mempunyai kecenderungan meningkat. Rata-rata rasio kemandirian yaitu hanya 38,76%. Ini berarti pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah daerah mulai meningkat.

3) Rasio efektivitas dan efisiensi pajak daerah

Tabel 5
Efektivitas Pajak Daerah
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	Pajak Daerah		Rasio	Kriteria
	Anggaran	Realisasi	Efektivitas	Efektifitas
2010	75.200.000.000	78.254.579.242	104,06%	Tidak Efektif
2011	101.349.000.000	120.457.515.127	118,85%	Tidak Efektif
2012	173.905.500.000	207.703.488.739,72	119,43%	Tidak Efektif
2013	217.017.475.838	227.748.852.911	104,94%	Tidak Efektif
2014	260.582.494.000	253.461.936.189	97,27%	Efektif
Rata-rata			108,91%	Tidak Efektif

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari tabel perhitungan di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tidak efektif karena dalam merealisasikan pajak daerah melampaui yang sudah dianggarkan yaitu rata-ratanya 108,91% berarti lebih dari 100%.

4) Derajat Kontribusi BUMD

Tabel 6
Derajat Kontribusi BUMD
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	**Bagian Laba BUMD**	**Penerimaan PAD**	**Derajat Kontribusi BUMD**
2010	11.031.304.700,40	179.423.640.057,51	6,15%
2011	10.121.339.866,01	228.870.559.645,59	4,42%
2012	11.496.627.185,59	338.283.728.285,01	3,40%
2013	12.596.415.894,77	383.052.140.420,42	3,29%
2014	14.087.531.070,13	470.641.528.444,03	2,99%
Rata-rata			4,05%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari tabel perhitungan dapat dilihat Derajat Kontribusi BUMD di atas menunjukkan bahwa Perusahaan Daerah mampu memberikan kontribusi bagi PAD Kota Yogyakarta hanya sebesar 4,05%. Hal ini menggambarkan dari tahun 2010-2014 Perusahaan daerah kontribusi BUMD masih sangat kecil.

5) **Analisis Kinerja Belanja**

a. Analisis Varians (Selisih Belanja)

Tabel 7
Laporan Perhitungan Belanja
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2010	917.054.170.180	839.866.480.661,43	91,58%
2011	990.788.116.640	932.018.507.343,03	94,07%
2012	1.146.288.393.816	1.023.803.006.143,51	89,31%
2013	1.377.414.820.394	1.232.911.934.134,18	89,51%
2014	1.422.093.336.380	1.336.610.467.867,75	93,99%
Rata-rata			91,69%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Berdasarkan analisis varians secara umum kinerja belanja Kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik karena realisasinya tidak melebihi yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2010-2014 yaitu sebesar 91,58%, 94,07%, 89,31%, 89,51%, 93,99%.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja

Tabel 8
Pertumbuhan Belanja
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	Belanja Daerah	Tingkat Pertumbuhan
2010	839.866.480.661,43	7,15%
2011	932.018.507.343,03	10,97%
2012	1.023.803.006.143,51	9,85%
2013	1.232.911.934.134,18	20,42%
2014	1.336.610.467.867,75	8,41%
Rata-rata		11,36%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa pertumbuhann belanja Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kecenderungan pertumbuhan belanja Kota Yogyakarta fluktuatif terlihat dari tahun 2010-2014 pertumbuhan berturut-turut yaitu sebesar 7,15%, 10,97%, 9,85%, 20,42%, 8,41%.

c. Analisis Keserasian Belanja

1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

Rasio Belanja operasi terhadap Total Belanja

Tabel 9
Belanja Operasi dan Belanja Modal
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	Total Belanja Operasi/ Total Belanja	Total Belanja Modal/ Total Belanja	% Rasio	
2010	784.516.524.448,43 839.866.480.661,43	54.040.432.205 839.866.480.661,43	93,41%	6,43%
2011	871.414.704.666,03 932.018.507.343,03	59.151.111.077 932.018.507.343,03	93,50%	6,35%
2012	935.210.038.805,71 1.023.803.006.143,51	88.335.891.337,80 1.023.803.006.143,51	91,35%	8,63%
2013	1.065.813.030.045,18 1.232.911.934.134,18	167.079.742.204 1.232.911.934.134,18	86,45%	13,55%
2014	1.142.988.276.601,75 1.336.610.467.867,75	193.078.279.594 1.336.610.467.867,75	85,51%	14,45%
Rata-rata			90,04%	9,88%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Berdasarkan tabel perhitungan dan histogram diatas dapat diketahui bahwa dari kelima tahun tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memprioritaskan

belanjanya untuk belanja operasi. Dalam arti bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta lebih memprioritaskan untuk pelaksanaan jalannya pemerintahan, sedangkan untuk pembangunan daerahnya masih sangat kecil.

2) Analisis Belanja Langsung dan tidak Langsung terhadap Total Belanja

Tabel 10
Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	**Total Belanja Langsung/ Total Belanja**	**Total Belanja Tidak Langsung/ Total Belanja**	**% Rasio**	
2010	304.402.335.119 839.866.480.661,43	535.464.145.542,43 839.866.480.661,43	36,24%	63,76%
2011	324.007.261.062 932.018.507.343,03	608.011.246.281,03 932.018.507.343,03	34,76%	65,24%
2012	413.843.791.840,80 1.023.803.006.143,51	609.959.214.302,71 1.023.803.006.143,51	40,42%	59,58%
2013	599.584.176.460 1.232.911.934.134,18	633.327.757.674,18 1.232.911.934.134,18	48,63%	51,37%
2014	674.551.333.203 1.336.610.467.867,75	662.059.134.664,75 1.336.610.467.867,75	50,47%	49,53%
Rata-rata			42,10%	57,90%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa untuk tahun 2010-2014 sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung.

3) Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 11
Efisiensi Belanja Daerah
APBD Kota Yogyakarta Tahun 2010-2014

Tahun	**Anggaran Belanja**	**Realisasi Belanja**	**Rasio Efisiensi**
2010	917.054.170.180	839.866.480.661,43	91,58%
2011	990.788.116.640	932.018.507.343,03	94,07%
2012	1.146.288.393.816	1.023.803.006.143,51	89,31%
2013	1.377.414.820.394	1.232.911.934.134,18	89,51%
2014	1.422.093.336.380	1.336.610.467.867,75	93,99%
Rata-rata			91,69%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2010-2014 (Data Diolah, 2015)

Dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2010-2014 berada dibawah 100%, dengan rata-rata 91,69%. Ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta baik.

3) Analisis Pembiayaan

Salah satu pos yang paling urgen untuk dianalisis dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).Makin besarnya SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum sudah baik terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran atau dengan kata lain realisasi SILPA tidak melebihi dari yang sudah dianggarkan yaitu dari tahun 2010-2014 sebesar 100%.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan:

1. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis varians, secara umum dapat dikatakan baik karena terlampauinya target anggaran, dimana dari tahun 2010-2014 rata-ratanya mencapai 106,46%. Kinerja pendapatan pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Yogyakarta tahun 2010-2014 cukup baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan Pendapatan dan PAD yang positif yaitu 24,52% dan 14,33%. Pertumbuhan PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan, sementara itu pertumbuhan pendapatan cenderung fluktuatif. Kinerja pendapatan dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan bahwa derajat desentralisasi Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik dengan rata-rata pada tahun 2010-2014 yaitu 27,35%; Kemandirian keuangan Kota Yogyakarta masih rendah dan mempunyai kecenderungan meningkat dengan rasio kemandirian rata-rata yaitu hanya 38,76%. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta tidak efektif dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan, dengan rata-rata rasio efektivitas pajak daerah yaitu 108,91%; derajat kontribusi BUMD terhadap PAD masih sangat kecil yaitu sebesar 4,05%.
2. Kinerja belanja pemerintah Kota Yogyakarta dilihat dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan baik, karena dari tahun 2010-2014 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya berturut-turut dari tahun 2010-2014 yaitu dengan rata-rata sebesar 91,69%. Pertumbuhan belanja Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan rata-rata 11,36% dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif. Untuk tahun 2010-2014, Pemerintah Kota Yogyakarta sangat memprioritaskan belanjanya untuk belanja operasi yaitu sebesar 90,04%, sedangkan untuk belanja modal yaitu sebesar 9,88%. Sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah dialokasikan untuk belanja tidak langsung sehingga rasio belanja langsung relatif kecil dibandingkan dengan rasio belanja tidak langsung. Rasio untuk belanja langsung yaitu sebesar 42,10% sedangkan

rasio belanja tidak langsung 57,90%. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dikatakan baik karena telah melakukan efisiensi belanja yang dibuktikan dengan rasio efisiensi pada tahun 2010-2014 berada dibawah 100%, dengan rata-rata 91,69%.

3. Kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dari analisis pembiayaan secara umum sudah terlihat dari SILPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah Kota Yogyakarta sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Afarahim.(2013), “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten Indagiri Hilir Periode 2005-2010 “, (Tugas Akhir).Jakarta : Universitas Terbuka Jakarta.

Afiah,Nunuy Nur (2009), *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana.

Ananda,Citra.Widyatmini (2012),”Analisis Kinerja Pengelolaan Anggara Pendapatan Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2009-2011”, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Banten : Universitas Gunadarma.

Astuti,Fibry (2015), “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten GunungKidul Tahun Anggaran 2010-2013”, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan). Yogyakarta : STIE Widya Wiwaha.

Halim,Abdul (2002), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, Jakarta : Salemba Empat.

Halim,Abdul (2011), *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta : UPP STIM YKP.

Halim,Abdul. Muhammad Syam Khusufi (2014), *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.

http://www.jogjakota.go.id. “Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015”. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015, pukul 17:51:50.

http://www.keuda.kemendagri.go.id. “Proses Penyusunan APBD”.Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 16:00:05.

http://www.bappeda.jogjaprov.go.id. “Rancangan RKPD 2016 Final”. Diunduh pada tanggal 22 November 2015 pukul 20:00:15.

http://www.e-journal.uajy.ac.id. “Struktur Organisasi Pemerintah Kota Yogyakarta”.Diunduh pada tanggal 26 November 2015 pukul 19:30:15.

Mahsun,Mohammad,(2006), *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE.

Marizka,Addina.(2009). “Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan”, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan. Medan : Universitas Sumatera Utara.

Muhibtari,Astriana Nabila (2014), .”Analisis Rasio Keuangan APBD Kota Magelang untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012”, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), Yogyakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Republik Indonesia ,Peraturan Pemerintah 58 thn 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri 37 Tahun 2014 tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.*

----------, Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 *tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

----------, Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

----------, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

----------, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggugjawaban dan Pengawasan Keuangan serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Sundari.Suprantiningrum,(2015), “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Di Era Otonomi Daerah”.*Media Ekonomi dan Manajemen*.Vol 30,34,36.

Syahputra,Rai Kresnawan, (2015), “Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009-2013”, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), Yogyakarta : Fakultas Ekonomi STIE Widya Wiwaha.

Priyastiwi.Mohammad Mahsun.(2005).“*Analisis Rasio Keuangan Pemerintah*”